

ANALISIS KOMPARATIF KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Zachary Octavianus Gerson Pioh¹, Ita Pingkan F. Rorong², Eeen Novritha Walewangko³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi manado 95115, Indonesia

Email : Piohzachary21@gmail.com, itapingkan@unsrat.ac.id, eenwalewangko@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Indonesia adalah negara kepulauan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi di setiap wilayahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda, serta fasilitas yang ada di masing-masing wilayah. Wilayah yang memiliki fasilitas lengkap, tenaga kerja terampil, dan letak geografis strategis cenderung mengalami perkembangan ekonomi yang lebih pesat. Metode penelitian kuantitatif serangkaian investigasi sistematis terhadap fenomena. Metode ini mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau komputasi data yang diambil melalui BPS, Bank Indonesia dan Publikasi Pemerintah Sulawesi Selatan menunjukkan pola yang berbeda. Pada 2018, indeks ketimpangan sangat tinggi (2,84), tetapi turun drastis pada 2019 (0,95) dan stabil di kisaran 1,0-1,05 hingga 2023. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Pertumbuhan Pro-Poor (Kakwani & Pernia, 2000), yang menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kemiskinan. Penurunan ketimpangan di Sulawesi Selatan mungkin disebabkan oleh program pemerataan seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur pedesaan, atau desentralisasi fiskal. Pada tahun 2018, indeks ketimpangan berada pada tingkat menengah (0,50), namun sejak 2019 hingga 2023, nilai indeks melonjak di atas 1,0 dan stabil pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan antarwilayah di Sulawesi Utara semakin melebar, dengan pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di wilayah inti seperti Manado, sementara daerah lain tertinggal.

Kata Kunci: Komparatif, Ketimpangan, Pembangunan Ekonomi

ABSTRACT

Indonesian policy is an island country with varying economic growth in each region. The differences are attributed to various factors, such as different natural resources and human resources, as well as facilities in each region. Areas with Complete Facilities, Skilled Manpower, and Strategic Geographic Location tend to experience faster economic development. Quantitative research methods are a series of semidemic investigations into phenomena. This method data collected to then be measured by statistical techniques or computational data taken through BPS, Bank Indonesia and Public Relations of the South Sulawesi Government shows different patterns. In 2018, the inequality index was very high (2.84), but fell sharply in 2019 (0.95) and stabilized 1.0-1.05 to 2023. This phenomenon can be explained through the theory of Pro-Poor Growth (Kakwani & Pernia, 2000), which emphasizes the importance of policies that promote growth and reduce poverty. The decrease in inequality in South Sulawesi may be caused by sub-district

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 922

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

expansion programs such as social assistance, rural infrastructure development, or fiscal decentralization. In 2018, the value of the boarding house soared at 1.0 and stabilized in high categories. This indicates that income disparity between regions in North Sulawesi is widening, with developments that tend to be concentrated in core areas such as Manado, while other areas are left behind.

Keywords: *Comparative, Inequality, Development Economics*

1. PENDAHULUAN

Infrastruktur antar pulau menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi laju perubahan ketimpangan di Indonesia. Infrastruktur yang memadai sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah karena kebutuhan akan sarana dan prasarana yang lengkap. Oleh karena itu, perkembangan infrastruktur memiliki hubungan yang sangat erat dan saling tergantung dengan pembangunan ekonomi. Ketimpangan pembangunan infrastruktur yang terjadi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi, yang pada akhirnya berujung pada ketimpangan kesejahteraan antar pulau. Menurut (Suparmoko, 1997), dalam (Islami & Iyan, 2018) hubungan ini menunjukkan betapa pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sulawesi Utara, sebuah provinsi di ujung utara Pulau Sulawesi, terkenal dengan keindahan alamnya, seperti Taman Laut Bunaken yang menjadi surga bagi penyelam. Ibu kotanya, Manado, adalah pusat ekonomi dan budaya yang berkembang, dengan perpaduan tradisi lokal dan pengaruh asing yang kuat. Ekonomi Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Perkebunan kelapa, cengkeh, dan pala menjadi komoditas utama yang mendukung perekonomian lokal. Selain itu, wilayah ini juga mulai berkembang dalam sektor teknologi informasi, menarik banyak investor yang melihat potensi besar di provinsi ini.

Sulawesi Selatan memiliki kota Makassar yang merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia Timur. Provinsi ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan, dengan Pelabuhan Makassar yang menjadi jalur vital perdagangan antar pulau. Sulawesi Selatan terkenal dengan keberagaman budayanya, termasuk rumah adat Tongkonan dan tarian tradisionalnya. Perekonomian Sulawesi Selatan didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, dengan komoditas seperti beras, jagung, dan kakao. Selain itu, sektor industri dan jasa juga semakin berkembang, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia.

Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan memiliki kesamaan geografis yang memberikan potensi ekonomi signifikan bagi kedua wilayah ini. Keduanya terletak di bagian utara dan selatan Pulau Sulawesi, yang memiliki garis pantai panjang dan akses langsung ke laut. Hal ini membuka peluang besar bagi sektor perikanan dan perdagangan maritim. Selain itu, kedua wilayah ini memiliki kondisi tanah yang subur dan iklim tropis yang mendukung pertanian, terutama tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, dan kakao. Potensi ini menjadikan Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang strategis untuk pengembangan sektor pertanian dan perikanan, serta menarik investasi di bidang tersebut. Geografi mereka yang kaya akan sumber daya alam juga memungkinkan perkembangan pariwisata, dengan keindahan alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan internasional.

Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan (Juta Rupiah), 2013-2023

Tahun	Sulawesi Utara	Sulawesi Selatan
2018	84,249,720.17	309,156,000.19
2019	89,009,264.78	330,506,000.38
2020	88,126,373.99	328,154,000.57

2021	91,790,692.02	343,395,000.41
2022	96,768,151.89	360,895,000.02
2023	102,070,480.20	377,162,000.17

Sumber: BPS Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, 2023

Data PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif di kedua provinsi, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, selama periode 2018 hingga 2023. Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan PDRB dari sekitar Rp 84,25 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 102,07 triliun pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya perkembangan ekonomi yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang cukup baik, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki PDRB yang jauh lebih besar dibandingkan Sulawesi Utara, dimulai dari Rp 309,16 triliun pada tahun 2018 dan meningkat menjadi Rp 377,16 triliun pada tahun 2023. Meskipun juga mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, Sulawesi Selatan menunjukkan pemulihan yang kuat dengan pertumbuhan yang konsisten hingga tahun 2023. Perbedaan nilai PDRB ini mencerminkan skala ekonomi Sulawesi Selatan yang lebih besar, didukung oleh luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih banyak serta sektor ekonomi yang lebih beragam.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan (Jiwa)

Tahun	Sulawesi Utara	Sulawesi Selatan
2018	2484000,39	8748052,00
2019	2506000,98	8819549,00
2020	2621000,92	9073509,00
2021	2638000,63	9156000,86
2022	2659000,54	9260000,07
2023	2681000,54	9362000,29

Sumber: BPS Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, 2023

Data jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, jumlah penduduk tercatat sekitar 2,48 juta jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,68 juta jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan perkembangan demografis yang relatif konsisten, yang dapat berdampak positif pada potensi pasar dan tenaga kerja di provinsi tersebut. Kenaikan jumlah penduduk ini juga menandakan kebutuhan yang meningkat akan layanan publik dan infrastruktur.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan Sulawesi Utara, dengan angka sekitar 8,75 juta jiwa pada tahun 2018 yang terus meningkat hingga mencapai sekitar 9,36 juta jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan juga menunjukkan kecenderungan yang stabil, yang sejalan dengan statusnya sebagai salah satu provinsi terpadat di Pulau Sulawesi. Peningkatan jumlah penduduk ini memberikan tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan ekonomi, dan penyediaan fasilitas sosial yang memadai.

Pertumbuhan jumlah penduduk di kedua provinsi ini mencerminkan dinamika demografis yang signifikan, seiring dengan perkembangan ekonomi dan infrastruktur di wilayah tersebut. Peningkatan jumlah penduduk ini juga menunjukkan potensi pasar yang besar bagi berbagai sektor industri, termasuk pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang dapat semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Ketimpangan pembangunan ekonomi antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dapat dilihat dari data PDRB dan jumlah penduduk yang berbeda. Sulawesi Selatan, dengan PDRB yang jauh lebih besar dan populasi yang lebih padat, menunjukkan ekonomi yang lebih maju dibandingkan dengan Sulawesi Utara. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh investasi yang lebih

banyak terkonsentrasi di Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Infrastruktur yang lebih baik dan akses ke pasar yang lebih luas di Sulawesi Selatan juga berkontribusi pada ketimpangan ini. Di sisi lain, Sulawesi Utara, meskipun mengalami pertumbuhan, masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan volume investasi yang masuk.

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi. Di Sulawesi Selatan, dengan ekonomi yang lebih berkembang, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan lebih baik dibandingkan dengan Sulawesi Utara. Ketimpangan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan memicu migrasi penduduk dari daerah kurang berkembang ke daerah yang lebih maju, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adil dalam distribusi investasi dan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian adalah:

- Untuk mengetahui Tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi utara tahun 2018-2023.
- Untuk mengetahui Tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018-2023.
- Untuk mengetahui perbandingan Tingkat ketimpangan ekonomi antara Provinsi Sulawesi utara dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Terkait dengan perekonomian daerah, menurut Arsyad (2015) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu tujuan utama dalam pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi adalah berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa, sering diukur melalui pendapatan riil per kapita (Suparmoko, 2000). Sebuah wilayah akan mengalami pertumbuhan ekonomi hanya jika ada peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut secara terukur.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Menurut Tarigan (2005) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan pendapatan masyarakat akibat adanya kenaikan dari seluruh nilai tambah secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut. Pendapatan wilayah menggambarkan suatu tingkat kemakmuran suatu wilayah oleh adanya aktivitas balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang beroperasi di wilayah tersebut. Untuk melihat pertambahan pendapatan dari waktu ke waktu, perhitungannya harus dinyatakan dalam nilai riil yaitu dinyatakan dalam harga konstan.

2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

2.4 Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah

Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan dari teori Neoklasik. Tesis utama dari teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antarwilayah dalam suatu negara; bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu (Tjahjati & Kusbiantoro, 1997).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Terok et al. (2019) Komparatif Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sumber daya alam sektor perkebunan terhadap ketimpangan wilayah sulawesi utara dan sulawesi tenggara, menganalisis sumberdaya manusia melalui indeks pembangunan manusia, dan mengetahui komparatif ketimpangan wilayah provinsi sulawesi utara dan tenggara. Analisis data berupa analisis secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel dan kuadran dengan menggunakan alat analisis Williamson Indeks dan Analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perkebunan, dan IPM (indeks pembangunan manusia) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan dan terdapat perbedaan bahwa sulawesi utara lebih unggul dari sektor perkebunan dan IPM di bandingkan sulawesi tenggara di lihat dari perbedaan jumlah rata-rata sektor perkebunan dan IPM sulawesi utara dan sulawesi tenggara. Hasilnya 1. Pengaruh Sektor Perkebunan terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi berdasarkan nilai signifikansi dari variabel sektor perkebunan adalah 0,0259 dimana hasil tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 artinya bahwa variabel sektor perkebunan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irkham (2019) Analisis ketimpangan wilayah provinsi banten. Bertujuan menganalisa ketimpangan pendapatan Provinsi Banten yang merupakan daerah hasil pemekaran. Penulisan ini menggunakan data sekunder tahun 2010-2016 yang berasal dari publikasi BPS Provinsi Banten. Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah menggunakan tipologi Klassen, indeks Williamson, indeks entropi Theil. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 8 kabupaten/kota di Banten terdapat empat daerah relatif tertinggal (semua kabupaten), satu daerah maju (Kota Cilegon), satu daerah cepat maju dan tumbuh (Kota Tangerang) dan dua daerah berkembang cepat (Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan). Ketimpangan pendapatan Provinsi Banten sangat tinggi dengan indeks Williamson 0,77 dan indeks Theil sebesar 12,34. Penelitian ini menyarankan Pemerintah daerah Provinsi Banten untuk memperhatikan sumber-sumber daya yang masing-masing berada di kabupaten/kota Banten dan meningkatkan SDM.

Penelitian yang dilakukan oleh Koagow et al. (2022) Disparitas Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Dengan Investasi Di Provinsi Sulawesi Utara Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pembangunan ekonomi dan hubungannya dengan investasi di Sulawesi utara tahun 2011 -2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data runtut waktu (Time Series) dari tahun 2011 -2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan teknik analisa yang di gunakan dalam Model Analisis Indeks Williamson dan uji korelasi Person, maka diketahui Di Sulawesi utara pemerataan pembangunan Berada bahwa ketimpangan di Sulawesi Utara tergolong menengah Berdasarkan hasil menunjukkan hubungan yang cukup lemah antara variabel disparitas dengan PMA dan PMDN, dengan arah negative peningkatan PMA dan PMDN menyebabkan Penurunan disparitas pembangunan ekonomi di Sulawesi utara, namun, berdasarkan nilai signifikansi hasilnya tidak ada korelasi antara PMDN dan PMA.

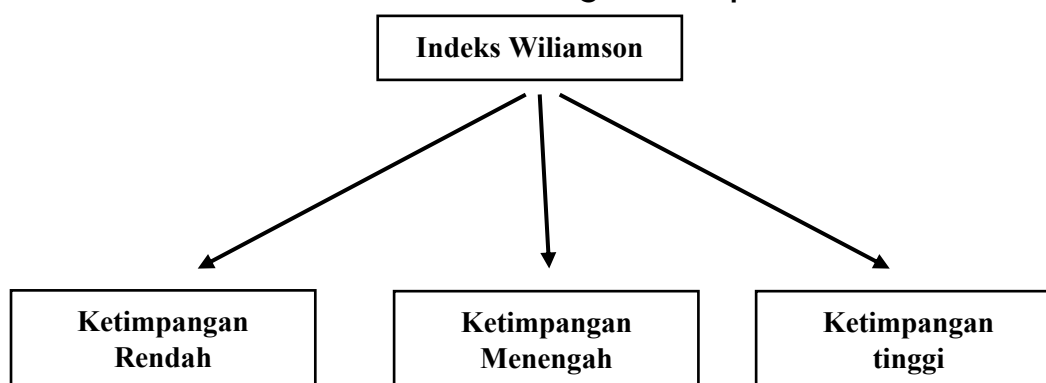
Penelitian yang dilakukan oleh Nurfifah et al. (2022) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Kota-Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap ketimpangan kota-kota di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode 2010-2020 dengan silang tempat 4 kota di provinsi Sulawesi utara. Metode analisis yang digunakan adalah indeks williamson dan analisis regresi data panel. Hasil perhitungan Indeks Williamson tingkat ketimpangan wilayah tertinggi terjadi pada Kota Manado dengan rata-rata sebesar 0.36 diikuti Kota Bitung 0.22, Kota Kotamobagu 0.082 dan yang terakhir Kota Tomohon 0.0047. Hasil regresi indeks bahwasecara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan, variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan Kota-kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktarina & Yuliana (2023) Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat: Pembuktian Hipotesis Kuznet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui: (1) hubungan pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat. (2) tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Barat berdasarkan analisis indeks Gini rasio. (3) pembuktian hipotesis kurva Kuznet di Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis dengan metode Ordinary Least Squared (OLS). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera barat. (2) tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak terlalu tinggi hal ini terlihat dari rata-rata tingkat ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat yang dilihat dari gini rasio sebesar 0,313. (3) hipotesis kurva Kuznet di Sumatera Barat terbukti diterima.

2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka skema dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah Penulis

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2009). Data sekunder digunakan karena penelitian yang dilakukan meliputi objek yang bersifat makro dan mudah didapat. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan. Sumber data berasal

dari berbagai sumber, antara lain Statistik Indonesia terbitan Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter terbitan Bank Indonesia, dan jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal ilmiah dan perpustakaan FEB Universitas Sam Ratulangi Manado.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk Mengetahui Analisis Komparatif Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Selatan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data runtut waktu (Time Series) dari tahun 2018- 2023 Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau pihak lain yang mengolahnya (Supranto, 2011).

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari data kuantitatif dengan metode sumber data sebagai berikut Data primer Pengumpulan data meliputi buku-buku, internet, perpustakaan, serta dokumen yang relevan dengan penelitian. Data Sekunder: Metode ini mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau komputasi data yang diambil melalui BPS, Bank Indonesia dan Publikasi Pemerintah

Metode Analisis Data

Analisis Indeks Williamson

Dalam Ukuran ketimpangan pembangunan antarwilayah yang mula-mula dilakukan adalah Williamson Indeks yang digunakan dalam studi Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966. Istilah Williamson Indeks muncul sebagai penghargaan kepada pengguna awal indeks tersebut dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Indeks Ketimpangan Williamson merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan yang terjadi Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Selatan. Ketimpangan pembangunan ekonomi dapat dianalisis dengan rumusan sebagai berikut (Sjafrizal, 2012).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan:

Iw = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita di kabupaten/kota i (Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Selatan)

Y = PDRB per kapita rata-rata provinsi (Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Selatan)

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i (Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Selatan)

n = Jumlah penduduk provinsi (Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Selatan)

Indeks Williamson ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu:

	: Ketimpangan taraf rendah
$0,35 < Iw < 0,50$	: Ketimpangan taraf menengah
$Iw > 0,50$	: Ketimpangan taraf tinggi

Hasil dari perhitungan Indeks Williamson memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Selatan. Jika nilai Indeks Williamson (Iw) mendekati angka satu, hal ini mencerminkan bahwa ketimpangan ekonomi antar daerah semakin melebar. Artinya, terdapat disparitas yang signifikan dalam pembagian sumber daya ekonomi dan peluang pembangunan di antara kabupaten-kota dalam wilayah tersebut. Sebaliknya, jika nilai Iw mendekati angka nol, itu menunjukkan bahwa ketimpangan semakin kecil, menandakan adanya upaya atau kondisi di mana distribusi kekayaan dan peluang ekonomi lebih merata di Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil perhitungan Indeks Williamson memberikan indikasi penting terkait dinamika ketidaksetaraan ekonomi antar daerah, yang dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan yang inklusif di tingkat regional.

Analisis Statistika Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Indriaty, 2013). Penentuan teknik analisis merupakan rangkaian proses yang terlibat dalam proses penelitian. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang disajikan dan hipotesis. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan. Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan fenomena atau data dalam tabel, grafik, rata-rata, frekuensi atau bentuk lainnya

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Indeks Williamson

Indeks Williamson yang mengukur tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2018 hingga 2023. Indeks ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar disparitas pendapatan atau kekayaan antar wilayah di provinsi tersebut.

Tabel 3 Indeks Williamson Sulawesi Utara 2018-2023

Provinsi Sulawesi Utara		
Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2018	0.50	Ketimpangan taraf menengah
2019	1.11	Ketimpangan taraf tinggi
2020	1.08	Ketimpangan taraf tinggi
2021	1.08	Ketimpangan taraf tinggi
2022	1.08	Ketimpangan taraf tinggi
2023	1.08	Ketimpangan taraf tinggi

Sumber : Diolah, 2025

Dari tabel ini terlihat bahwa pada tahun 2018, tingkat ketimpangan di Sulawesi Utara berada pada taraf menengah dengan nilai indeks sebesar 0,50. Namun, mulai tahun 2019 hingga 2023, ketimpangan meningkat secara signifikan dan stabil pada taraf tinggi dengan nilai indeks di atas 1,0.

Indeks Williamson yang mengukur tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2018 hingga 2023. Indeks ini digunakan untuk menilai seberapa besar disparitas pendapatan atau kekayaan antar wilayah di provinsi tersebut.

Tabel 4 Indeks Williamson Sulawesi Selatan 2018-2023

Provinsi Sulawesi Selatan		
Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2018	2.84	Ketimpangan taraf tinggi
2019	0.95	Ketimpangan taraf tinggi
2020	1.03	Ketimpangan taraf tinggi
2021	1.02	Ketimpangan taraf tinggi
2022	1.03	Ketimpangan taraf tinggi
2023	1.05	Ketimpangan taraf tinggi

Sumber : Diolah, 2025

Tabel ini terlihat bahwa pada tahun 2018, tingkat ketimpangan di Sulawesi Selatan sangat tinggi dengan nilai indeks sebesar 2,84. Pada tahun berikutnya, 2019, terjadi penurunan signifikan menjadi 0,95, meskipun masih dikategorikan sebagai ketimpangan taraf tinggi menurut keterangan yang ada. Selama periode 2019 hingga 2023, nilai indeks Williamson relatif stabil di kisaran sekitar 1,0 hingga 1,05, yang menunjukkan ketimpangan tetap berada pada taraf tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan dari tahun 2018, disparitas ekonomi antar daerah di Sulawesi Selatan masih cukup besar dan menjadi perhatian penting bagi pembuat kebijakan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi.

Pembahasan

Berdasarkan data Indeks Williamson, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan ketimpangan ekonomi yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, indeks ketimpangan berada pada taraf menengah (0,50), namun sejak 2019 hingga 2023, nilainya melonjak di atas 1,0 dan stabil pada kategori tinggi. Menurut teori Kuznets (1955) ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi sebelum akhirnya menurun seiring pertumbuhan yang inklusif. Namun, dalam kasus Sulawesi Utara, peningkatan ketimpangan yang terus-menerus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum diikuti oleh pemerataan yang memadai. Hal ini sejalan dengan pendapat Williamson (1965) yang menyatakan bahwa ketimpangan antardaerah sering terjadi ketika pembangunan terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah lain tertinggal.

Kenaikan tajam Indeks Williamson di Sulawesi Utara dapat dijelaskan melalui teori Polarisasi Ekonomi Myrdal dan Sitohang (1957) yang menyebutkan bahwa daerah maju cenderung menarik sumber daya dari daerah tertinggal (backwash effect), memperparah kesenjangan. Faktanya, pembangunan infrastruktur dan investasi di Sulawesi Utara mungkin lebih terpusat di Manado dan sekitarnya, sementara wilayah pedesaan atau kepulauan kurang berkembang. Selain itu, teori Ketergantungan (Dependency Theory) menjelaskan bahwa ketimpangan juga bisa dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang bergantung pada sektor tertentu, seperti pariwisata dan perdagangan, yang rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19. Dampaknya, pemulihan ekonomi pasca-pandemi mungkin tidak merata, sehingga ketimpangan tetap tinggi.

Sulawesi Selatan menunjukkan pola yang berbeda. Pada 2018, indeks ketimpangan sangat tinggi (2,84), tetapi turun drastis pada 2019 (0,95) dan stabil di kisaran 1,0-1,05 hingga 2023. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Pertumbuhan Pro-Poor Pernia dan Kakwani (2000), yang menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kemiskinan. Penurunan ketimpangan di Sulawesi Selatan mungkin disebabkan oleh

program pemerataan seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur pedesaan, atau desentralisasi fiskal. Namun, stabilnya indeks di level tinggi menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil, sesuai dengan teori Trap Ketimpangan Galor & Zeira (1993) yang menyatakan bahwa ketimpangan yang sudah mengakar sulit diatasi tanpa intervensi struktural.

Perbedaan tren ketimpangan antara kedua provinsi dapat dianalisis melalui teori Pembangunan Wilayah (Friedmann, 1966) yang membagi daerah menjadi "inti" (core) dan "pinggiran" (periphery). Sulawesi Utara mungkin mengalami konsentrasi pertumbuhan di wilayah inti (seperti Manado), sementara Sulawesi Selatan berhasil melakukan redistribusi melalui kebijakan yang lebih inklusif. Teori Institutional Economics North (1990) juga menjelaskan bahwa perbedaan kelembagaan, seperti efektivitas pemerintah daerah dalam penyaluran program sosial, dapat memengaruhi ketimpangan. Jika Sulawesi Selatan memiliki tata kelola yang lebih baik, maka penurunan ketimpangan lebih mungkin terjadi dibandingkan Sulawesi Utara.

Teori Pertumbuhan Inklusif Brezzi et al. (2011) pemerintah perlu mendorong kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain: (1) penguatan desentralisasi fiskal untuk mendorong pembangunan di daerah tertinggal, (2) peningkatan investasi di sektor produktif seperti pertanian dan UMKM di wilayah pinggiran, serta (3) perluasan akses pendidikan dan kesehatan untuk memutus mata rantai ketimpangan antargenerasi. Selain itu, teori New Regionalism menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah untuk mengurangi kesenjangan. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang kuat, ketimpangan yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

5. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Ketimpangan Ekonomi di Sulawesi Utara (2018-2023) Penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan ketimpangan ekonomi yang signifikan selama periode 2018-2023. Pada tahun 2018, indeks ketimpangan berada pada tingkat menengah (0,50), namun sejak 2019 hingga 2023, nilai indeks melonjak di atas 1,0 dan stabil pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan antarwilayah di Sulawesi Utara semakin melebar, dengan pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di wilayah inti seperti Manado, sementara daerah lain tertinggal.
2. Tingkat Ketimpangan Ekonomi di Sulawesi Selatan (2018-2023) Sementara itu, Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pola yang berbeda. Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan sangat tinggi (2,84), tetapi mengalami penurunan signifikan pada 2019 (0,95) dan stabil di kisaran 1,0-1,05 hingga 2023. Meskipun terjadi perbaikan, ketimpangan di Sulawesi Selatan tetap tergolong tinggi, menunjukkan bahwa upaya pemerataan pembangunan belum sepenuhnya berhasil mengatasi kesenjangan ekonomi yang mendasar.
3. Perbandingan Ketimpangan Ekonomi antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan (2018-2023) Perbandingan antara kedua provinsi mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara mengalami peningkatan ketimpangan yang konsisten, sementara Sulawesi Selatan berhasil menurunkan ketimpangan dari level sangat tinggi ke level tinggi yang lebih stabil. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam kebijakan pembangunan dan efektivitas program redistribusi pendapatan di masing-masing provinsi. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan terarah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di kedua wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. STIEYKPN.
- Brezzi, M., Dijkstra, L., & Ruiz, V. (2011). *OECD extended regional typology: the economic performance of remote rural regions*.
- Friedmann, J. (1966). Poor regions and poor nations: Perspectives on the problem of Appalachia. *Southern Economic Journal*, 465-473.
- Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. *The Review of Economic Studies*, 60(1), 35-52.
- Indriaty, S. F. (2013). Peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Gresik. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Irkham, M. (2019). Analisis ketimpangan wilayah provinsi banten. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 16(1), 98-110.
- Islami, A., & Iyan, M. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Pulau. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Koagow, Y. Y., Walewangko, E. N., & Rorong, I. P. (2022). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Dengan Investasi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 1-12.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. (Edisi 3). Erlangga.
- Kuznets, S. (1955). International differences in capital formation and financing. *In Capital Formation and Economic Growth*, 19-111).
- Myrdal, G., & Sitohang, P. (1957). *Economic theory and under-developed regions*.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge university press.
- Nurfifah, R., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Ketimpangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 25-36.
- Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat: Pembuktian Hipotesis Kuznet. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 1(1), 25-31.
- Pernia, E., & Kakwani, N. (2000). *What is Pro-poor Growth*.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Suparmoko. (2000). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Daerah*. BPFE.
- Supranto, J. (2011). *Statistik Teori dan Aplikasi*,. Erlangga.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan pembangunan wilayah*. PT. Bumi Aksara.
- Terok, V. J., Engka, D. S., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Analisis Komparatif Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Tjahjati, & Kusbiantoro. (1997). *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Williamson, O. E. (1965). Innovation and market structure. *Journal of Political Economy*, 73(1), 67-73.